



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN PALARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RICKY DHARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK : 742070

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 60.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.449

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 133.695.449

III. HUTANG Rp. 82.202.799

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 51.492.650

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD TAUFIK**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KELURAHAN GUNUNG LINGAI**
3. NHK : **998464**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **85.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH / MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1 PA /SPD -MTR/RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **150.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **310.150.000**

III. HUTANG Rp. **40.675.652**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

269.474.348

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.